

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR ORGANISASI GENG MOTOR OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG

Winter Yohanes Hasiholan

NPP. 30.0597

Asal Pendaftaran Kota Bandung, Provinsi Jawa barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

E-mail : yohanes.winter@gmail.com

Pembimbing Skripsi : David Erwin Mayor, S.Sos, M.BA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): As one of the big cities in Indonesia, there are many social organizations in the city of Bandung. Where four of them are social organizations with motorcycle gang backgrounds. The organization has a long history of feuds so that it is often involved in clashes with one another which creates fear for the people of Bandung City. **Purpose:** This study aims to determine the efforts of the Bandung City National Unity and Politics Agency in resolving conflicts between motorcycle gang organizations through a conflict management process based on Siti Asiah Tjabolo's Conflict Management theory (2017). **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (8 informants), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study indicate that in resolving conflicts between motorcycle gang organizations through the conflict management process, there are still several indicators of conflict management that have not been implemented, such as problem classification and problem analysis. And also found obstacles in the problem solving process. Where the conflicting parties reject efforts to resolve the conflict peacefully and the limitations of personnel both in number and field experience. **Conclusion:** Efforts to resolve conflicts between motorcycle gang organizations through a conflict management process will produce maximum results if each stage is carried out properly. And it is advisable to prepare anticipatory steps to prevent other conflicts from arising in the future.

Keywords: Social Organization; Conflict Between Motorcycle Gang Organization; Conflict Management;

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, terdapat banyak organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung. Dimana empat diantaranya merupakan organisasi kemasyarakatan dengan latar belakang geng motor. Organisasi tersebut memiliki sejarah permusuhan yang panjang sehingga kerap kali terlibat benturan satu sama lain yang menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat Kota Bandung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor melalui proses manajemen konflik berdasarkan teori Manajemen Konflik Siti Asiah Tjabolo (2017). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (8 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik antar organisasi geng motor melalui proses manajemen konflik masih terdapat beberapa indikator manajemen konflik yang belum terlaksana seperti klasifikasi masalah dan analisis masalah. Dan juga ditemukan adanya hambatan pada proses penyelesaian masalah. Dimana pihak yang berkonflik menolak upaya penyelesaian konflik secara damai serta keterbatasan personil baik jumlah maupun pengalaman lapangan. **Kesimpulan:** Upaya penyelesaian konflik antar organisasi geng motor melalui proses manajemen konflik akan membuahkan hasil yang maksimal apabila setiap tahapannya dijalankan dengan baik. Dan disarankan untuk menyusun langkah antisipasi guna mencegah timbulnya konflik lain di waktu mendatang.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan; Konflik Antar Organisasi Geng Motor; Manajemen Konflik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pasca bergulirnya reformasi 1998 banyak perubahan kehidupan politik kenegaraan secara fundamental, serta kehidupan bangsa yang mengalami berbagai tuntutan-tuntutan baru dan berimplikasi kepada perlunya tatanan hukum baru yang sesuai dan mampu menjawab tantangan jaman. Salah satu perkembangan yang sangat mencolok, munculnya berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sampai dengan tahun 2022 terdapat sekitar 512.997 ormas yang tersebar di 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Ormas pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Risnandar Mahiwa, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Seminar bertajuk Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Demokrasi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta. Dari sekian

banyaknya ormas yang ada di Indonesia, 911 diantaranya berdiri dan beroperasi di wilayah Kota Bandung.

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Bandung merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa/km². Dilansir dari website resmi *Open Data Jabar* terdapat 1.349 ormas di wilayah Jawa Barat dan 911 ormas di wilayah Kota Bandung.

Diantara banyaknya ormas di Kota Bandung, terdapat empat ormas yang mayoritas berisikan pemuda dan memiliki sejarah panjang selama berdiri di Kota Bandung. Berawal dari kesamaan hobi yang menyukai dunia otomotif, kemudian berkembang pesat menjadi geng motor di tahun 80-an hingga kini bertransformasi menjadi ormas. Dalam perkembangannya keempat organisasi tersebut kerap kali terlibat dalam berbagai konflik. Mulai dari upaya saling memprovokasi satu sama lain hingga bentrokan fisik yang menimbulkan korban jiwa. Keempat organisasi geng motor tersebut diantaranya Exalt To Creativity (XTC), Brigade To Seven (BRIGEZ), Moonraker (M2R) dan Grab On Road (GBR).

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Baik XTC, BRIGEZ, M2R dan GBR kerap kali terlibat konflik satu sama lain. Konflik yang mengakibatkan terjadinya aksi saling serang menggunakan senjata tumpul, senjata tajam bahkan senjata api yang berujung dengan ditangkanya anggota mereka dan juga anggotanya yang merengas nyawa. Meskipun telah berubah status menjadi sebuah ormas yang sah dan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Masih saja terjadi kasus bentrokan yang melibatkan keempat ormas ini. Berikut kasus bentrokan terbaru dalam 3 tahun kebelakang:

Tabel 1.2

Kasus Bentrokan Ormas di Kota Bandung

No	Kasus	Pihak Yang Terlibat	Korban
1.	Pengeroyokan oleh geng motor terhadap seorang pemuda di Jalan Ambon Kota Bandung (22 April 2022)	XTC	Satu remaja mengalami luka ringan akibat pengeroyokan
2.	Bentrokan geng motor dengan ormas di Kawasan Lengkong, Buah Batu, Kota Bandung (29 Juli 2021)	GBR dan Ormas Manggala	Dua orang mengalami luka tusukan senjata tajam
3.	Bentrokan geng motor di Kawasan Dago Jalan Ir. H. Djuanda Kota Bandung (1 November 2020)	GBR dan M2R	Seorang remaja berinisial SS meninggal dunia akibat dikeroyok

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kasus bentrokan yang melibatkan organisasi geng motor yang menjadi indikasi bahwa konflik antar organisasi geng motor masih kerap kali terjadi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan manajemen konflik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Penelitian Elsa Nuranisyah dan Maria Fitriah yang berjudul Analisis Manajemen Konflik Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Desa Bojong menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah konflik melalui proses manajemen konflik dilakukan dengan langkah mengurangi konflik dalam hal ini mendinginkan permasalahan yang terjadi dan dilanjutkan dengan penyelesaian konflik. Dalam penelitian ini pemerintah berada di posisi sebagai salah satu pihak yang berkonflik, sehingga pemerintah melakukan inisiatif untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik yang terjadi (Elsa Nuranisyah, Maria Fitriah 2020). Penelitian Budi Syahputra, Hidayat, dan Ichwan Azhari yang berjudul Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Medan dan Upaya Penyelesaiannya menemukan bahwa konflik yang terjadi khususnya yang melibatkan organisasi kemasyarakatan diakibatkan oleh perebutan wilayah antar organisasi yang dapat berujung pada adanya tindakan kekerasan fisik diantara organisasi yang berkonflik. Dalam hal ini pemerintah berada di posisi sebagai penengah konflik. Sehingga pemerintah menginisiasi upaya penyelesaian konflik dengan menyepakati kembali batas-batas wilayah antar organisasi kemasyarakatan dan melakukan

perjanjian yang mengikat agar menghormati batas-batas yang telah disepakati. Serta menandai batas-batas wilayah dengan simbol-simbol dari organisasi masyarakat terkait (Budi Syahputra, Hidayat, Ichwan Azhari 2020). Penelitian Erwin Susanto, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, dan Dasim Budimansyah yang berjudul Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karwang menemukan bahwa konflik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya terjadi karena adanya perebutan limbah perusahaan yang bernilai ekonomis. Dimana limbah memiliki peluang bisnis yang menjanjikan sehingga menarik perhatian beberapa organisasi kemasyarakatan untuk merebut hak untuk mengelola limbah tersebut. Dalam penelitian ini pemerintah berada di posisi sebagai penengah dimana pemerintah dengan kewenangannya segera menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya mencegah terulangnya konflik serupa. Dan juga melakukan penindakan hukum bagi organisasi kemasyarakatan yang menjadi pelaku kerusuhan (Erwin Susanto, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, Dasim Budimansyah 2020). Penelitian Aditya Wibowo, Anita Lisdiana, dan Arista Wati yang berjudul Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur) menemukan bahwa dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat dapat ditempuh melalui proses mediasi yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diperoleh jalan tengah guna menyelesaikan konflik. Dan juga dapat ditempuh melalui upaya arbitrase dimana pemerintah sebagai pihak ketiga. Akan tetapi jika belum didukung sistem hukum yang kuat upaya tadi hanya akan menyelesaikan konflik untuk sesaat. Dalam penelitian ini konflik yang terjadi bersifat vertikal yang melibatkan perusahaan dan masyarakat sekitar (Aditya Wibowo, Anita Lisdiana, Arista Wati 2021)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penyelesaian Konflik Antar Organisasi Geng Motor oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung melalui proses manajemen konflik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu juga, penelitian ini merujuk pada teori Manajemen Konflik Siti Asiah Tjabolo (2017) sebagai indikator dalam penelitian yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik melalui manajemen konflik perlu melalui beberapa tahapan seperti Perencanaan (Identifikasi Masalah, Klasifikasi Masalah, dan Analisis Masalah), Pelaksanaan (Penentuan Metode dan Penyelesaian Masalah) serta Evaluasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyelesaian konflik antar organisasi geng motor yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung melalui manajemen konflik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan fenomena secara deskriptif dengan tidak memisahkan fokus dan tidak menyudutkan pihak manapun akan tetapi mencari jalan keluar bagi masalah. Penelitian kualitatif disebut *Verstehen* (pemahaman mendalam) karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas (Irawan, 2006). Kemudian metode deskriptif yang ditujukan untuk mencari fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Maksudnya adalah mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan, dan juga proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Moh. Nazir, 2011).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan 8 informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Kepala Unit Intel dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, serta pengurus atau anggota dari organisasi geng motor (dalam hal ini organisasi geng motor sebagai objek penelitian sebanyak 4 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis proses manajemen konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor menggunakan teori dari Siti Asiah Tjabolo yang menyatakan bahwa proses manajemen konflik setidaknya harus melalui tiga tahapan utama yakni Perencanaan (Identifikasi Masalah, Klasifikasi Masalah, Analisis Masalah), Pelaksanaan (Penentuan Metode, Penyelesaian Masalah), dan Evaluasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Perencanaan

Dalam proses perencanaan, penulis menganalisis bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam merencanakan manajemen konflik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor di Kota Bandung. Tahap perencanaan terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari:

A. Identifikasi Masalah

Melakukan pengamatan terkait faktor penyebab konflik dan gejala yang menyertainya. Hasil identifikasi yang diperoleh menyatakan bahwa konflik antar organisasi geng motor disebabkan oleh faktor utama yakni sejarah permusuhan diantara organisasi geng motor. Kemudian diperkuat dengan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi geng motor seperti konvoi kendaraan bermotor, penggunaan atribut organisasi geng motor, dan upaya provokasi yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Kemunculan faktor-faktor tersebut biasanya diawali gejala yang sama, yakni aktivitas kumpul-kumpul di kios ataupun tempat tertentu dari sore hari hingga larut malam dengan konsentrasi 20-40 orang di setiap lokasi.

B. Klasifikasi Masalah

Melakukan pengelompokan terhadap faktor penyebab konflik yang telah teridentifikasi, yang nantinya faktor penyebab konflik akan dibagi kedalam beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menggunakan hasil klasifikasi dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Ini dikarenakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung hanya menyelesaikan konflik melalui jalan damai, berbeda dengan kepolisian yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum sehingga memerlukan klasifikasi secara detail. Klasifikasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Klasifikasi Sumber Penyebab Konflik

No.	Kriteria Sumber Penyebab Konflik	Bentuk Penyebab Konflik
1.	Penyebab Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dendam lama antar organisasi geng motor yang belum diselesaikan atau sudah diselesaikan namun masih ada pihak yang merasa tidak puas. b. Stempel musuh yang diberikan oleh salah satu organisasi geng motor terhadap organisasi geng motor lainnya sehingga dapat menimbulkan benturan tanpa alasan yang jelas. c. Adanya anggota organisasi geng motor yang selalu membawa nama organisasi geng motor / komunitas dalam masalah pribadi. d. Anggapan masing-masing organisasi geng motor yang menilai bahwa aksi jalanan dan kekerasan adalah hal wajar dan hanya kenakalan biasa. e. Transformasi yang tidak berjalan dengan baik, terkhusus pada organisasi geng motor yang telah mengikrarkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan secara sah. Sehingga masih ada anggota yang tidak mau mendukung perubahan organisasi ke arah yang lebih baik.
2.	Penyebab Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> a. Banyaknya aksi <i>rolling</i> (konvoi kendaraan bermotor) dalam rangka menyambut ulang tahun dari sebuah geng motor atau komunitas hingga agenda lainnya seperti bakti sosial, buka bersama, sahur <i>on the road</i> dan foto studio yang kerap kali diakhiri dengan aksi <i>rolling</i> di seputaran Kota Bandung. b. Mendekati bulan Ramadhan kerap kali diadakan kegiatan bakti sosial, buka bersama dan sahur <i>on the road</i> (SOTR) yang berpotensi menimbulkan konflik apabila ada dua atau lebih geng motor dengan agenda yang sama berpapasan di jalan atau melaksanakan kegiatan ditempat yang berdekatan. c. Salah paham di jalan karena adanya penggunaan atribut tertentu (Jaket, Kaos, Kemeja, Stiker, Gelang, dan atribut lainnya). d. Gesekan dalam kompetisi olahraga antar sekolah yang mengundang massa dalam jumlah banyak sebagai supporter. Dimana kebanyakan supporter didominasi oleh anggota organisasi geng motor dan kerap kali bergesekan. Yang pada akhirnya masing-masing organisasi geng motor memutuskan untuk menempuh jalur kekerasan menyelesaikan masalah. e. Perebutan wilayah kekuasaan (biasanya wilayah parkir) yang sebenarnya tidak melibatkan organisasi secara langsung namun organisasi mengetahui bahwa ada anggotanya yang memegang wilayah tertentu dengan membawa nama organisasi.

		<p>f. Adanya kelompok-kelompok kecil (di Kota Bandung biasa disebut Komunitas Pelajar) yang memiliki kedekatan khusus ataupun memang berafiliasi dengan organisasi geng motor yang secara tidak langsung menyeret organisasi geng motor untuk terlibat dalam masalah kelompok-kelompok kecil. Keterlibatan tersebut tidak membawa massa dari geng motor dalam jumlah banyak, akan tetapi tetap membawa nama organisasi secara terang-terangan (menjadi bekingan kelompok-kelompok kecil).</p> <p>g. Residivis yang melakukan aksi dengan membawa nama organisasi secara tidak bertanggung jawab.</p>
--	--	--

C. Analisis Masalah

Mempelajari sebuah konflik berdasarkan faktor penyebabnya, dimana sebuah konflik muncul diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab. Jika terdapat perbedaan faktor penyebab antara konflik yang satu dengan konflik yang lain, besar kemungkinan konflik yang terjadi juga akan memiliki sedikit perbedaan. Dengan alasan yang sama seperti klasifikasi masalah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung juga menggunakan hasil analisis yang dilakukan oleh kepolisian. Analisis yang dilakukan menyatakan bahwa konflik antar organisasi geng motor memiliki alur perkembangan konflik dari titik awal kemunculan konflik hingga titik puncak konflik. Karena masing-masing organisasi geng motor memiliki anak cabang pada tingkat kecamatan atau kelurahan dan awal mula konflik berasal dari anak cabang tersebut. Alur yang dimaksud sebagai berikut:

i. Tahap Pertama Konflik

Dalam tahap ini, anak cabang organisasi “a” berkonflik dengan anak cabang organisasi “b” dan belum melibatkan anak cabang lainnya ke dalam konflik.

ii. Tahap Kedua Konflik

Dalam tahap ini, berita tentang konflik telah menyebar ke anak cabang lainnya baik pada organisasi “a” maupun organisasi “b” sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa konflik akan menyebar dan meningkatkan tensi diantara organisasi “a” dengan organisasi “b”.

iii. Tahap Ketiga Konflik

Dalam tahap ini, organisasi “c” dan organisasi “d” yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik ikut mewaspadai konflik yang terjadi yang mungkin saja menyebar ke organisasi mereka. Karena pada dasarnya keempat organisasi tersebut saling bermusuhan dan

memiliki catatan benturan satu dengan yang lain. Sehingga meningkatkan tensi diantara keempat organisasi geng motor.

iv. Tahap Keempat Konflik

Dalam tahap ini, terjadi mis komunikasi yang menyebabkan salah sasaran. Dimana organisasi “a” atau organisasi “b” terlibat aksi saling serang, namun secara tidak sengaja malah menyerang organisasi “c” atau organisasi “d”. Sehingga memicu organisasi “c” dan organisasi “d” untuk terlibat ke dalam konflik.

v. Tahap Kelima Konflik

Dalam tahap ini, konflik sudah meluas dan menyebar ke setiap organisasi geng motor yang menyebabkan tensi diantara keempat organisasi geng motor memanas. Sehingga muncul kemungkinan akan adanya aksi saling serang diantara keempat organisasi geng motor. Meskipun tidak benar-benar melibatkan anggota secara keseluruhan akan tetapi dapat menimbulkan beberapa titik konflik dalam satu waktu.

3.2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan, penulis menganalisis bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menentukan metode serta melaksanakan metode yang telah ditentukan berdasarkan hasil perencanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari dua bagian yakni:

A. Penentuan Metode

Menentukan langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor sesuai dengan kondisi di lapangan serta temuan dalam perencanaan. Disini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menetapkan metode penyelesaian konflik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Bagian Ketiga Pasal 8. Dimana terdapat opsi penyelesaian konflik yakni arbitrase, mediasi dan konsultasi. Juga dengan satu langkah penyelesaian akhir yakni rekonsiliasi.

B. Penyelesaian Masalah

Melakukan langkah penyelesaian konflik di lapangan dengan menggunakan salah satu opsi penyelesaian konflik baik arbitrase, mediasi, ataupun konsultasi. Atau bahkan menggunakan seluruh opsi secara berurutan apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan satu opsi. Dan melakukan rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaian akhir apabila telah didapatkan sebuah kesepakatan damai diantara pihak yang berkonflik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bandung dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor menempuh dua tahapan penyelesaian sebagai berikut:

i. Penyelesaian Parsial

Bentuk penyelesaian konflik yang ditujukan untuk konflik pada tingkat kewilayahan seperti kecamatan atau kelurahan. Dan juga sebagai bentuk awal dalam menyelesaikan konflik yang sudah menyebar ke wilayah lain (Penyelesaian Total).

ii. Penyelesaian Total

Bentuk penyelesaian konflik lanjutan dari penyelesaian parsial. Dimana jika konflik belum meluas ke wilayah lain, penyelesaian total dapat memutus rantai penyebaran konflik dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak orang. Dan jika konflik sudah meluas ke wilayah lain, penyelesaian total dapat menurunkan tensi diantara pihak yang berkonflik serta menyelesaikan konflik pada tingkat kewilayahan secara menyeluruh.

Dan untuk metode penyelesaian seperti arbitrase, mediasi, konsultasi dan rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

i. Arbitrase

Metode yang menekankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk menengahi konflik. Dengan mendengarkan keluhan, keinginan, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak yang berkonflik untuk kemudian merumuskan poin-poin penyelesaian masalah yang nantinya disepakati oleh pihak yang berkonflik dan wajib untuk dilaksanakan.

ii. Mediasi

Metode yang menekankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk memfasilitasi dan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama merumuskan poin-poin penyelesaian konflik tanpa intervensi dari pihak ketiga. Disini pihak ketiga hanya menjadi inisiator dan saksi dari kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik.

iii. Konsultasi

Metode yang menekankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk menurunkan ego dari pihak yang berkonflik dengan cara mengembangkan pola pikir bahwa kekerasan bukanlah jalan penyelesaian konflik. Sehingga pihak-pihak yang berkonflik dapat memutuskan jalan penyelesaian sendiri tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya.

iv. Rekonsiliasi

Metode yang menekankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk memulihkan kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan cara mengadakan agenda yang melibatkan seluruh anggota organisasi geng motor dan dapat merekatkan kembali rasa persatuan diantara organisasi geng motor.

3.3. Evaluasi

Disini penulis menganalisis bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung melakukan evaluasi dari penyelesaian konflik yang telah dilaksanakan. Dimana dapat dipastikan terdapat hal-hal yang belum optimal dan perlu ditingkatkan kembali untuk memaksimalkan upaya manajemen konflik. Berdasarkan temuan, penulis mendapati bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya penanganan konflik antar organisasi geng motor. Dengan melihat efektivitas dari metode penyelesaian konflik yang telah diterapkan, faktor penyebab konflik menjadi hal yang paling sering dievaluasi. Karena faktor tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan individu yang terlibat di dalam konflik serta perubahan lingkungan sosial di dalam masyarakat Kota Bandung. Termasuk juga merumuskan upaya pencegahan terhadap beberapa faktor yang memang bisa dihindari seperti aksi konvoi kendaraan bermotor.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Upaya penyelesaian konflik melalui manajemen konflik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung merupakan bentuk kehadiran pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Penulis menemukan bahwa pemerintah melakukan upaya penyelesaian dengan memosisikan diri sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak kepada siapapun yang terlibat di dalam konflik. Berbeda dengan temuan Elsa Nuranisyah dan Maria Fitriah yang menyebutkan bahwa

pemerintah menjadi pihak yang terlibat di dalam konflik karena permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial *Covid-19* (Elsa Nuranisyah, Maria Fitriah 2020), dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan termasuk ke dalam golongan penerima bantuan dari pemerintah.

Dan sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, maka perlu adanya inisiatif yang dilakukan pemerintah guna menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat khususnya konflik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana halnya dengan temuan Budi Syahputra, Hidayat dan Ichwan Azhari dimana pemerintah menginisiasi upaya penyelesaian konflik serta menengahi konflik dengan wewenang yang dimilikinya sehingga menghasilkan penyelesaian dan upaya pencegahan dari konflik antar organisasi kemasyarakatan (Budi Syahputra, Hidayat, Ichwan Azhari 2020).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat yang menjadi rintangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor. Dimana hambatan tersebut antara lain:

i. **Pihak Yang Berkonflik Tidak Kooperatif**

Dalam pelaksanaan di lapangan, ada indikasi bahwa terdapat penolakan dari beberapa pihak yang terlibat konflik terkait upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor. Sehingga memerlukan waktu ekstra dalam menyelesaikan konflik atau bahkan mungkin saja upaya penyelesaian konflik tidak dapat berjalan akibat penolakan tersebut.

ii. **Keterbatasan Jumlah Personil**

Sebagai organisasi perangkat daerah di bawah naungan Pemerintah Kota Bandung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung lebih berfokus kepada tugas-tugas administratif dibandingkan dengan tugas-tugas lapangan. Sehingga sebagian besar personil lebih berfokus pada tugas administratif dan menyebabkan kekurangan personil dalam tugas di lapangan.

iii. **Keterbatasan Pengalaman Personil**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung pada dasarnya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik. Sehingga sebagian besar

personil kurang berpengalaman dalam menghadapi konflik sosial khususnya konflik antar organisasi geng motor.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa upaya yang telah ditempuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menyelesaikan konflik antar organisasi geng motor belum terlaksana dengan maksimal. Dimana dalam hal klasifikasi masalah dan analisis masalah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung masih menggunakan data dari instansi lain yakni Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Meskipun tidak menyalahi aturan dan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga negara, akan lebih baik jika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung mengolah kembali data yang diperoleh sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dalam upaya penyelesaian konflik antar organisasi geng motor.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian pun hanya dilakukan pada konflik yang melibatkan organisasi geng motor dan belum menyentuh organisasi kemasyarakatan lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam menangani konflik antar organisasi kemasyarakatan secara lebih luas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, Prasetya, Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2006)
- Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Nuranisyah, Elsa, and Maria Fitriah, 'Analisis Manajemen Konflik Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Desa Bojong', 2020
- Susanto, Erwin, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, and Dasim Budimansyah, 'Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Karawang', 2020
- Syahputra, Budi, Hidayat, and Ichwan Azhari, 'Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Di Kota Medan Dan Upaya Penyelesaiannya', 2020
- Syam, Firdaus, 'Rancangan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No.8 Tahun 1985)', 2017, 1-59
- Tjabolo, Siti Asiah, Manajemen Konflik: Teori Dan Aplikasi (Surabaya: Pustaka Cendekia, 2017)
- Wibowo, Aidtya, Arista Wati, and Anita Lisdiana, 'Manajemen Konflik Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Tambang Batu Bara (Studi Kasus Di Kalimantan Timur)', 2021